

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian nasional karena menjadi mediator di antara kelompok yang mempunyai dana berlebih dengan kelompok pengguna dana (Simatupang, H. 2020). Lewat kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dan dialokasikan kembali melalui penyaluran pembiayaan ataupun kredit, terutama ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bank ikut mendorong tumbuhnya investasi, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Fahrial, 2018). Selain itu, perbankan juga membantu menjaga kestabilan ekonomi lewat peran bank sentral dalam mengendalikan inflasi dan menjalankan kebijakan moneter (Sitorus et al. 2024). Perbankan mendukung prinsip ekonomi yang merata dengan memberikan akses pembiayaan bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau, serta membantu pembangunan infrastruktur dan proyek strategis melalui pembiayaan jangka panjang (Riset Kita, 2023). Jadi, bank bukan hanya lembaga yang mencari keuntungan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional (Fahrial, 2018).

Efisiensi adalah parameter penting dalam menilai kinerja perusahaan, termasuk bank. Efisiensi dalam bidang perbankan ialah faktor esensial yang perlu diperhatikan guna menciptakan stabilitas kinerja keuangan yang berkesinambungan (Marsondang, 2019). Efisiensi pada bank diukur dari sejauh mana bank mampu menghasilkan tingkat produksi yang terbaik menggunakan sumber daya secara minimal. Identifikasi tingkat efektivitas dalam penggunaan sumber daya ini memungkinkan dilakukannya analisis terhadap kinerja suatu bank (Yeniwati, 2020). Tingkat efisiensi yang tinggi memungkinkan bank menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, meningkatkan profitabilitas, dan memperkuat stabilitas keuangan. Sebaliknya, efisiensi yang rendah dapat menjadi indikator awal potensi kebangkrutan dan melemahnya daya saing bank.

Efisiensi juga menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja bank dan sebagai alat strategis dalam pengambilan kebijakan manajerial, karena bank yang efisien lebih mampu menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Ningsih, 2023).

Efisiensi berdasarkan tujuannya terbagi menjadi dua yaitu efisiensi biaya dan efisiensi produksi. Efisiensi biaya umumnya digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan atau bank mampu meminimalkan biaya dalam menghasilkan output tertentu tanpa mengurangi kualitas kinerja. Indikator yang banyak digunakan antara lain rasio biaya pokok pendapatan terhadap pendapatan (*Cost of Goods Sold to Revenue Ratio*), rasio beban operasional terhadap pendapatan (*Operating Expense Ratio*), serta rasio perputaran aset (*Asset Turnover Ratio*). Dalam konteks perbankan syariah, efisiensi biaya sering diukur dengan variabel input seperti beban kerja, biaya bagi hasil, dan beban pembiayaan operasional, sementara variabel output meliputi rasio profitabilitas seperti ROA, ROE, CAR, FDR, dan NPF. Efisiensi biaya yang tinggi mencerminkan kemampuan lembaga untuk mengelola sumber daya secara hemat dan optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan maupun daya saing.

Efisiensi produksi berfokus pada sejauh mana suatu lembaga mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output secara optimal. Indikator yang sering digunakan dalam pengukuran efisiensi produksi meliputi jumlah tenaga kerja, aset tetap, serta dana pihak ketiga (DPK) sebagai representasi input utama. Sementara itu, dari sisi output, indikatornya dapat berupa total pembiayaan yang disalurkan, pendapatan operasional, hingga portofolio investasi. Pengukuran efisiensi produksi umumnya dilakukan dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) atau *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) yang membandingkan kinerja antar bank atau antar periode. Tingginya nilai efisiensi produksi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya internalnya untuk menghasilkan layanan dan produk keuangan, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lebih efektif serta mendukung pertumbuhan aset dan profitabilitas.

Perbankan syariah di Indonesia bermula pada awal dekade 1990-an ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Sebagai perbankan syariah pertama, yang menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem keuangan berbasis syariah (Annisa, 2019). Sebelum merger, industri perbankan syariah terdiri dari berbagai entitas seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI syariah yang beroperasi secara terpisah dan menghadapi tantangan seperti pangsa pasar yang kecil, keterbatasan modal, dan efisiensi yang belum optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian BUMN menginisiasi penggabungan ketiga bank tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang secara resmi berdiri pada 1 Februari 2021 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Apriliyanti, 2025).

Pasca merger, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami transformasi besar yang mencakup penguatan struktur organisasi, peningkatan efisiensi operasional, dan ekspansi layanan berbasis digital. Merger tiga bank syariah milik BUMN tidak hanya menyatukan aset dan sumber daya, tetapi juga menyatukan nilai-nilai syariah dan budaya kerja yang berbeda menjadi satu entitas yang solid dan berorientasi pada pelayanan masyarakat berbasis prinsip Islam (Apriliyanti, 2025). Dengan dukungan pemerintah yang kuat dan strategi manajerial yang terintegrasi, BSI berhasil memperluas jangkauan layanan hingga ke pasar internasional, serta meningkatkan inklusi keuangan syariah secara signifikan (Bank Syariah Indonesia, 2024). Selain itu BSI juga mencatat pertumbuhan pembiayaan yang agresif terutama di sektor ritel dan UMKM, serta peningkatan jumlah nasabah yang mencapai lebih dari 21 juta orang dalam empat tahun (Abigail, 2025). Salah satu indikator keberhasilan transformasi ini adalah lonjakan total aset BSI dari Rp239,58 triliun pada akhir 2020 menjadi Rp408,61 triliun pada akhir 2024, mencerminkan pertumbuhan sebesar 14,28% secara CAGR dan menempatkan BSI di peringkat enam bank terbesar di Indonesia dari sisi aset (Apriliyanti, 2025).

Meskipun pertumbuhan aset dan ekspansi layanan BSI menunjukkan perkembangan positif, keberhasilan merger tidak sepenuhnya dapat diukur melalui indikator kuantitatif seperti ukuran aset atau laba semata. Dalam industri

perbankan, terutama perbankan syariah, ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah kemampuan bank dalam mengelola input dan mengubahnya menjadi output secara optimal. Hal ini penting karena bank dapat memiliki aset besar namun tetap tidak efisien apabila struktur biaya tidak dikelola dengan baik, pemanfaatan dana tidak optimal, atau kapasitas produksi layanan tidak seimbang dengan sumber daya yang digunakan. Oleh sebab itu, efisiensi teknis menjadi dimensi penting untuk mengetahui apakah merger benar-benar menghasilkan perbaikan kinerja internal yang mendasar dan berjangka panjang.

Untuk dapat mengevaluasi efisiensi teknis bank secara tepat, pemilihan variabel input dan output menjadi aspek metodologis yang penting. Variabel tersebut harus mencerminkan proses produksi bank secara nyata, terutama dalam konteks bank syariah yang kegiatan utamanya berfokus pada penghimpunan dana, pengelolaan biaya, dan penciptaan pendapatan dari aktivitas operasional inti. Oleh karena itu, analisis input output tidak hanya berfungsi sebagai alat statistik semata, melainkan juga sebagai representasi logis dari hubungan antara sumber daya yang digunakan bank dan hasil yang diperolehnya. Setelah mempertimbangkan karakteristik perbankan syariah modern dan kebutuhan pengukuran efisiensi yang akurat, penelitian ini menggunakan variabel DPK, aset tetap dan biaya tenaga kerja sebagai input, serta pendapatan operasional sebagai output.

Dalam konteks perbankan syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan indikator penting yang merepresentasikan kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungan, giro, maupun deposito berbasis prinsip syariah. DPK berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan yang kemudian disalurkan kembali ke sektor riil, sehingga mencerminkan kinerja intermediasi bank. Selain menjadi sumber utama likuiditas, DPK juga berfungsi sebagai indikator stabilitas dana pihak ketiga yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap bank. Dalam perbankan syariah, stabilitas DPK memiliki peran strategis karena mekanisme penghimpunan dana didasarkan pada prinsip syariah seperti wadi'ah dan mudharabah, yang menekankan keadilan dan bagi hasil. Perubahan besar dalam struktur DPK dapat memengaruhi kapasitas

pembiayaan, eksposur risiko likuiditas, dan kemampuan bank dalam menjaga efektivitas fungsi intermediasi. Oleh karena itu, DPK tidak hanya dipandang sebagai input kuantitatif, tetapi juga sebagai faktor yang menunjukkan hubungan antara bank dengan masyarakat, kondisi persaingan industri, serta efektivitas manajemen dana yang dilakukan oleh bank.

Selain dana pihak ketiga, biaya tenaga kerja merupakan salah satu input utama dalam proses produksi perbankan. Biaya tenaga kerja mencerminkan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan bank untuk membiayai sumber daya manusia, seperti gaji, tunjangan, insentif, dan pelatihan karyawan. Dalam industri perbankan syariah, peran tenaga kerja menjadi sangat krusial karena operasional bank tidak hanya bergantung pada modal dan teknologi, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola pembiayaan, menghimpun dana, serta memberikan layanan berbasis prinsip syariah. Oleh karena itu, biaya tenaga kerja mencerminkan intensitas penggunaan faktor manusia dalam proses produksi perbankan.

Besarnya biaya tenaga kerja tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja apabila tidak diikuti dengan produktivitas yang optimal. Bank dengan jumlah dan biaya tenaga kerja yang tinggi dapat mengalami inefisiensi apabila kemampuan sumber daya manusia tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebaliknya, pengelolaan tenaga kerja yang efektif memungkinkan bank meningkatkan output berupa pendapatan operasional tanpa harus meningkatkan biaya secara proporsional. Dengan demikian, biaya tenaga kerja menjadi variabel input yang relevan dalam analisis efisiensi teknis, karena menunjukkan sejauh mana bank mampu mengonversi pengeluaran sumber daya manusia menjadi kinerja operasional yang produktif.

Selain dana pihak ketiga dan biaya tenaga kerja, aset tetap juga merupakan salah satu input penting dalam proses produksi perbankan. Aset tetap mencerminkan kapasitas fisik dan infrastruktur bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, seperti gedung kantor, jaringan cabang, perangkat teknologi informasi, serta sistem pendukung layanan perbankan. Dalam konteks perbankan syariah, aset tetap berperan dalam menunjang kelancaran aktivitas

penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pelayanan kepada nasabah. Namun demikian, kepemilikan aset tetap yang besar tidak selalu mencerminkan tingkat efisiensi yang tinggi apabila tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap yang efektif menjadi faktor penting dalam menentukan efisiensi teknis bank.

Sementara itu, pendapatan operasional menjadi salah satu indikator output yang merefleksikan kemampuan bank menghasilkan pemasukan dari aktivitas utamanya, misalnya melalui pendapatan pembiayaan, pendapatan bagi hasil, dan jasa layanan lainnya. Dalam penelitian efisiensi, pendapatan operasional sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan bank dalam mengonversi input (seperti DPK, aset tetap dan biaya tenaga kerja) menjadi hasil yang produktif.

Pendapatan operasional juga menjadi indikator keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan layanan dan produk yang ditawarkan. Dalam perbankan syariah, pendapatan operasional dihasilkan dari berbagai sumber seperti pendapatan bagi hasil, margin pembiayaan murabahah, ujarah dari layanan perbankan, serta komisi transaksi. Variasi sumber pendapatan ini mencerminkan diversifikasi aktivitas bank untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan saja. Selain itu, tingkat pendapatan operasional mencerminkan efektivitas strategi pemasaran, kualitas pembiayaan yang disalurkan, serta kemampuan bank dalam memperluas basis nasabah. Oleh karena itu, pendapatan operasional merupakan ukuran output yang dapat menggambarkan kinerja produktif bank secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, analisis efisiensi teknis bank syariah sebelum dan sesudah merger dengan mempertimbangkan indikator ini menjadi relevan, karena dapat memberikan gambaran sejauh mana merger berkontribusi terhadap peningkatan kinerja intermediasi maupun produktivitas bank.

Tantangan struktural seperti skala usaha yang relatif kecil, keterbatasan permodalan, kemampuan penghimpunan Dana DPK yang masih terbatas, serta efisiensi operasional yang belum optimal, masih menjadi hambatan utama dalam memperkuat daya saing bank syariah nasional. Kondisi tersebut semakin kompleks karena bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang

memiliki infrastruktur teknologi lebih maju, jaringan layanan yang lebih luas, serta struktur biaya yang lebih efisien (Irawan, 2021). Ketidakseimbangan ini menyebabkan fungsi intermediasi bank syariah belum berjalan seoptimal yang diharapkan, baik dari sisi pengelolaan dana maupun kemampuan menghasilkan pendapatan operasional yang berkelanjutan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil langkah strategis dengan mengkonsolidasikan tiga bank syariah milik Negara. Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah ke dalam satu entitas besar bernama Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 (Sucipto, 2022). Penggabungan ini tidak hanya diarahkan untuk mempersatukan kekuatan modal, tetapi juga untuk mengintegrasikan jaringan layanan, sistem teknologi, dan proses operasional agar lebih efisien. Selain itu, merger ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas bank dalam menghimpun DPK dan aset tetap serta memperkuat kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis. Dengan dukungan pemerintah dan integrasi proses bisnis, BSI diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di tingkat nasional dan global.

Secara umum, merger dalam industri perbankan bertujuan menciptakan sinergi, meningkatkan efisiensi, memperbesar skala ekonomi, serta memperbaiki kinerja keuangan institusi yang bergabung (Gustina, 2017). Namun, keberhasilan sebuah merger tidak cukup dievaluasi dari peningkatan pendapatan atau pertumbuhan bisnis saja. Pengukuran yang lebih komprehensif diperlukan untuk melihat apakah bank mampu menjalankan kegiatan operasional secara efisien, terutama dalam memanfaatkan input yang dimiliki seperti DPK, aset tetap dan biaya tenaga kerja untuk menghasilkan output berupa pendapatan operasional. Dalam konteks ini, efisiensi teknis menjadi indikator penting yang menunjukkan sejauh mana bank dapat mengelola sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah penggabungan tiga bank syariah BUMN menjadi BSI benar-benar menghasilkan perbaikan efisiensi

teknis atau justru menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan organisasi yang lebih besar dan kompleks (Wicaksono, 2014).

Sejalan dengan fenomena tersebut, penelitian oleh Ta Minh Tri dan Nguyen Phuong Anh (2020) di Vietnam menunjukkan bahwa merger perbankan tidak selalu memberikan dampak yang sama terhadap efisiensi. Dengan menggunakan metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) terhadap 26 bank domestik selama periode 2010–2018, penelitian tersebut menemukan bahwa efisiensi teknis rata-rata mencapai 85%, dan terdapat peningkatan efisiensi pada periode pasca merger hanya pada pendekatan intermediasi, sedangkan pendekatan produksi tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa pengaruh merger terhadap efisiensi bank dapat berbeda antarnegara tergantung pada pendekatan dan karakteristik sistem perbankan masing-masing.

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang BSI lebih berfokus pada pengukuran kinerja keuangan seperti *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan BOPO, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti terkait efisiensi teknis pasca merger. Selain itu, pendekatan yang sering digunakan adalah non parametrik seperti *Data Envelopment Analysis* (DEA), yang tidak mempertimbangkan unsur ketidakpastian dalam proses produksi. Sementara itu, pendekatan parametrik seperti *Stochastic Frontier Analysis* (SFA), yang mampu mengakomodasi *stochastic error* dan heterogenitas unit analisis, masih jarang digunakan dalam kajian efisiensi Bank Syariah Indonesia.

Penelitian sebelumnya pun menunjukkan hasil yang beragam. Diantaranya, Rizal dkk. (2023) menggunakan metode DEA dan uji t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi BSI sebelum dan sesudah merger cenderung stabil, namun tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hananto dkk. (2024) menunjukkan bahwa efisiensi teknis BSI meningkat menjadi 100% pada tahun kedua pasca merger, khususnya dalam fungsi intermediasi dan profitabilitas. Hasil yang beragam ini membuka ruang eksplorasi metodologis yang lebih dalam dan memperkuat pentingnya penelitian lanjutan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya efisiensi teknis sebagai tolok ukur keberhasilan merger serta masih terbatasnya literatur yang menggunakan pendekatan SFA dalam konteks merger bank syariah, maka penelitian ini menjadi sangat relevan dan strategis. Selain mengisi celah dalam kajian akademik, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dan manajemen Bank Syariah Indonesia dalam mengevaluasi efektivitas merger sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi teknis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Perbandingan Efisiensi Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Merger”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efisiensi teknis bank-bank syariah di Indonesia sebelum merger?
2. Bagaimana tingkat efisiensi teknis Bank Syariah Indonesia setelah merger?
3. Apakah terdapat perbedaan efisiensi teknis yang signifikan antara sebelum dan sesudah merger?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat efisiensi teknis bank-bank syariah di Indonesia sebelum merger.
2. Mengukur tingkat efisiensi teknis Bank Syariah Indonesia setelah merger.
3. Menganalisis perbedaan efisiensi teknis yang signifikan antara sebelum dan sesudah merger menggunakan metode SFA.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi syariah, khususnya terkait efisiensi teknis bank hasil merger yang masih jarang dikaji di Indonesia. Penggunaan pendekatan *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) menawarkan alternatif metodologis terhadap pendekatan non parametrik seperti *Data Envelopment Analysis* (DEA), sehingga membuka peluang pengembangan analisis efisiensi teknis yang lebih akurat dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah dan otoritas keuangan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan merger bank syariah. Temuan ini juga dapat digunakan oleh manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengevaluasi strategi pasca merger, serta mendorong peningkatan daya saing industri perbankan syariah di tingkat nasional dan global.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan efisiensi Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger, yang diukur menggunakan variabel input berupa dana pihak ketiga (DPK), aset tetap dan biaya tenaga kerja, serta variabel output berupa pendapatan operasional. Data yang digunakan adalah data triwulanan masing-masing bank dalam periode 2015 hingga 2024.